

ANALISIS WACANA KRITIS PROGRAM MATA NAJWA “BALADA PERDA” DI METROTV

Christo Rico Lado, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

christoricolado@gmail.com

Abstrak

Pada 16 Januari 2013, Mata Najwa mengangkat tema Balada Perda di tengah pemberitaan mengenai perda yang kontroversial. Mata Najwa membahas empat aturan daerah yang mengundang pro dan kontra dalam masyarakat yaitu aturan larangan mengangkang bagi kaum perempuan di Lhokseumawe; aturan nama bayi dengan ciri kedaerahan di Surabaya; inisiatif bupati mengajak pejabat daerah ke penjara di Bualemo; dan aturan wajib mengaji dan mematikan televisi di Kampar. Dalam paradigma kritis, penggunaan bahasa dalam media bersifat sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Melihat hal ini, peneliti tertarik melihat wacana yang dibangun dalam episode tersebut.

Peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis model Teun van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa perda melayani kepentingan pemerintah; perda mengintervensi privasi masyarakat; dan perda mendiskriminasi kelompok tertentu. Pembentukan wacana ini sekaligus menunjukkan pendefinisian dan penempatan posisi yang dilakukan Mata Najwa terhadap partisipan produksi wacana. Mata Najwa menempatkan Najwa Shihab sebagai pihak yang dominan sehingga realitasnya bisa diterima publik sebagai kebenaran.

Dengan perpaduan analisis teks, kognisi sosial dan konteks, peneliti menemukan wacana yang dibangun Mata Najwa meneguhkan pandangan bahwa perda pasca otonomi daerah mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Peneliti juga menemukan bahwa tayangan Mata Najwa Balada Perda dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi media Metro TV.

Kata Kunci : Analisis Wacana Kritis, Peraturan Daerah, *Talk Show*, Mata Najwa, Metro TV

Pendahuluan

Program Mata Najwa edisi Rabu, 16 Januari 2013 mengangkat tema Balada Perda. Tayangan ini dipicu kemunculan surat edaran Walikota Lhokseumawe yang mengatur agar perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor, serta rancangan peraturan daerah DPRD Kota Surabaya mengenai peraturan nama bayi dengan ciri khas kedaerahan. Mata Najwa mengangkat tema “Balada Perda” untuk membahas kedua aturan daerah tersebut, bersama dengan sejumlah aturan daerah lain yang mengundang pro dan kontra masyarakat.

Pemberitaan mengenai peraturan daerah yang kontroversial bukan hal baru dalam media. Hasil penelusuran *online* pada tempo.co dan menemukan variasi

pemberitaan pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2010. Pemberitaan mengenai peraturan daerah kemudian kembali mendapat perhatian ketika pada bulan Januari 2013 Walikota Lhokseumawe mengeluarkan surat edaran yang mengatur agar warga perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Melalui penelusuran arsip *online*, hanya Mata Najwa yang memberikan perhatian khusus pada topik ini melalui *wrap* (*istilah MetroTV untuk paket berisi sejumlah berita berbeda dengan topik yang sama*) sejumlah aturan daerah yang mengundang pro dan kontra. Program *talk show* dalam stasiun TV berita lain, seperti Apa Kabar Indonesia Malam di TV One bahkan tidak mengangkat fenomena perda. Perhatian Mata Najwa ini mengindikasikan ada wacana yang ingin dibangun melalui pemberitaan mengenai Balada Perda ini. Sejalan dengan itu, Wijaya (S.F. Wijaya, personal communication, April 10, 2013) mengungkapkan sejak selesai riset, Mata Najwa memang memiliki agenda sendiri untuk membentuk opini khalayak. Agenda tersebut yang menentukan desain edisi Balada Perda.

Pengertian wacana memiliki tiga hal yang sentral yaitu teks, konteks dan wacana (Eriyanto, 2012, p.9). Studi wacana di sini memasukkan konteks, karena konteks berpengaruh pada produksi wacana. Dalam penelitian ini, wacana dalam Mata Najwa “Balada Perda” harus dilihat dengan konteks, seperti situasi politik khususnya dinamika penyelenggaraan otonomi daerah.

Beberapa penelitian tentang wacana yang dibangun media telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya “Orientalist Discourse in Media Texts” oleh Necla Mora pada tahun 2009, “A Media Discourse Analysis of Racism in South African School” oleh Corene de Wet pada tahun 2001, dan “Wacana dalam Pemberitaan Mengenai RUU Keamanan Nasional di Harian Kompas” oleh Virginia Listyani pada tahun 2012. Ketiga penelitian tersebut dilakukan pada pemberitaan media cetak. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis Theo van Leeuwen serta Terre Blache dan Durrheim.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini melihat wacana yang dibangun dalam media televisi, khususnya dalam program *talk show*. Penelitian terhadap wacana dalam program *talk show* sebelumnya telah ada yaitu “Critical Discourse Analysis of Political TV Talks Shows of Pakistani Media” oleh Hafiz Ahmad Bilal pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk namun tidak melakukan dimensi analisis kognisi sosial. Dalam penelitian mengenai wacana yang dibangun dalam program Mata Najwa “Balada Perda” ini peneliti akan menggunakan ketiga dimensi analisis van Dijk yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial.

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana wacana yang dibangun dalam program Mata Najwa “Balada Perda” di Metro TV.

Tinjauan Pustaka

Analisis Wacana Kritis

Dalam tataran kritis, menurut Foucault wacana bukanlah sekadar serangkaian kata atau proposisi dalam teks. Wacana adalah sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana membentuk seperangkat konstruk tertentu yang membentuk realitas. Artinya, persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh pandangan (dominan) yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak. Wacana membatasi pandangan kita mengenai suatu objek. Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi aturan wacana itulah yang membuat objek tersebut berubah. Dalam komunikasi massa melalui televisi, khalayak bukan dikontrol melalui upaya fisik, tetapi melalui wacana di dalam tayangan televisi tersebut (Eriyanto, 2012, p. 74-75).

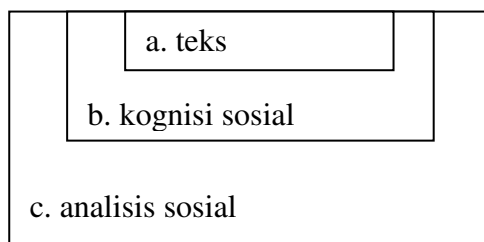
Althusser (dalam Eriyanto, 2012, p.19) menjelaskan wacana sebagai praktik dimana seseorang diposisikan dalam posisi tertentu dalam hubungan sosial. Wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Wacana tertentu membentuk subjek dalam posisi-posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam CDA, wacana tidak dipahami sebagai studi bahasa seperti dalam linguistik tradisional, namun juga dihubungkan dengan konteks, dalam pengertian bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Dr. McGregor (Titscher, 2000, p. 147) dalam tulisannya mengatakan “*our words never neutral*”. Kata-kata kita tidak pernah netral. CDA menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan realitasnya masing-masing.

Metode

Konseptualisasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, yang sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup pada teks, tetapi juga harus dilihat praktik produksinya. Eriyanto (2012, p.225) menggambarkan model dari analisis van Dijk sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Analisis Van Dijk

Sumber: Eriyanto, 2012, p. 225s

Model yang dikembangkan van Dijk tidak hanya memandang struktur mikro (a. Teks) dan struktur makro (c. Konteks), tetapi juga struktur meso yang menghubungkan teks dan konteks, yaitu kognisi sosial. Dimensi teks melihat bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kemudian dimensi kognisi sosial mempunyai dua arti. Pertama, kognisi sosial menunjukkan bagaimana proses teks diproduksi wartawan/media sendiri. Kedua, kognisi sosial menggambarkan nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserap oleh wartawan, dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita. Dimensi terakhir yaitu konteks sosial. Dimensi ini mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah tertentu (Eriyanto, 2012, p.222-224).

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Program Mata Najwa edisi Balada Perda yang ditayangkan pada 16 Januari 2013, sedangkan objek penelitian ini adalah wacana yang dibangun dalam program Mata Najwa “Balada Perda”.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berupa kata dan kalimat serta insert gambar/grafis dalam Mata Najwa “Balada Perda”. Unit analisis ini didapat dari mentranskrip percakapan dan meng-*capture* gambar/grafis dalam video Mata Najwa “Balada Perda”.

Analisis Data

Untuk menganalisis wacana, van Dijk membagi teknik analisis ke dalam tiga dimensi analisis, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan analisis sosial (Eriyanto, 2012, p.229-274).

1. Struktur Teks

a. Topik

Topik berita baru bisa disimpulkan setelah tuntas membaca, mendengar, atau menonton berita tersebut. Gagasan penting van Dijk, wacana umumnya dibentuk dalam tata aturan umum. Teks tidak hanya didefinisikan tetapi suatu pandangan umum yang koheren, yaitu bagian-bagian dalam teks menunjuk pada satu titik gagasan umum, dan bagian-bagian tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menggambarkan topik umum tersebut.

b. Skematik

Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung teori tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi menyembunyikan informasi penting. Teks atau wacana pada umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan hingga membentuk kesatuan arti.

c. Semantik

Semantik atau makna yang ingin ditekankan dalam teks dapat dilihat dari beberapa hal seperti latar, detil, maksud, dan praanggapan. Latar, detil dan maksud berhubungan dengan informasi mana yang ditekankan dan mendapatkan porsi lebih banyak. Sementara itu elemen praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks.

d. Sintaksis

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana kalimat yang dipilih. Sintaksis dapat dilihat dari koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti.

e. Stilistik

Stilistik berhubungan dengan bagaimana pilihan kata yang digunakan dalam teks berita. Elemen stilistik dikenal dengan leksikon. Pada dasarnya leksikon menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata dari sekian banyak pilihan yang ada.

f. Retoris

Retoris berhubungan dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. Retoris dapat dilihat dari penggunaan grafis, metafora serta ekspresi. Grafis melihat penggunaan grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan. Elemen grafik memberikan efek kognitif, dalam arti ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukkan bahwa informasi tersebut penting dan harus diperhatikan.

2. Kognisi Sosial

Kognisi sosial melihat bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial berkaitan dengan kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut. Van Dijk berangkat dari gagasan bahwa teks sendiri tidak mempunyai makna, melainkan diberikan oleh proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Wartawan tidak dipandang sebagai individu yang netral, tetapi individu yang mempunyai bermacam-macam nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapat dari kehidupannya.

Van Dijk menyebutkan bahwa peristiwa dipahami dan dimengerti berdasarkan skema. Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental di mana di dalamnya tercakup bagaimana kita memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa. Ada beberapa macam skema/model yang dapat digambarkan berikut ini:

a. Skema Person

Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain. Misalnya bagaimana wartawan Islam memandang dan memahami orang Kristen akan mempengaruhi teks berita yang ia tulis.

b. Skema Diri

Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang.

c. Skema Peran

Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati seseorang dalam masyarakat.

d. Skema Peristiwa

Skema ini barangkali paling banyak dipakai, karena hampir setiap hari kita selalu melihat dan mendengar peristiwa. Dan setiap peristiwa selalu ditafsirkan dan dimaknai dalam skema tertentu. Umumnya, skema peristiwa inilah yang paling banyak dipakai oleh wartawan.

Model sangat berkaitan dengan representasi sosial, yakni bagaimana pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang dalam masyarakat. Wartawan hidup di antara keyakinan dan pandangan masyarakat tersebut. Meskipun demikian, bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi wartawan akan dipengaruhi oleh pengalaman, memori, dan interpretasi wartawan.

Bagi van Dijk, kognisi sosial terutama berhubungan dengan proses produksi berita. Produksi berita sebagian besar dan terutama terjadi dalam kognisi seorang wartawan. Oleh karena itu pertanyaan utama yang diajukan oleh van Dijk adalah bagaimana wartawan mendengar dan membaca peristiwa, bagaimana peristiwa tersebut dimengerti, dimaknai, dan ditampilkan dalam pikiran. Bagaimana peristiwa tersebut difokuskan, diseleksi, dan disimpulkan dalam keseluruhan proses produksi berita? Bagaimana informasi yang telah dipunyai dan dimiliki oleh wartawan tersebut dipakai dalam memproduksi berita.

3. Analisis Sosial

Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Menurut van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting: kekuasaan dan akses.

a. Praktik kekuasaan

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan suatu kelompok (atau anggotanya) yang mengontrol kelompok lain. Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atau sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status dan pengetahuan. Kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui tindakan persuasif dengan jalan mempengaruhi kondisi mental seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Analisis wacana

memberikan perhatian kepada dominasi. Dominasi direproduksi oleh pemberian akses yang khusus pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Ia juga memberi perhatian atas proses produksi lewat legitimasi melalui bentuk kontrol pikiran.

b. Akses mempengaruhi wacana

Analisis wacana memberikan perhatian pada akses, bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak melalui kontrol atas topik dan isi wacana

Temuan Data

Secara skematik, data-data Mata Najwa “Balada Perda” dapat disajikan dalam tabel di baah ini:

Tabel 1. Temuan Data Skematik

Waktu	Segmen	Keterangan
00:56-01.34	Pembukaan Mata Najwa	Mata Najwa memberikan pernyataan bahwa muncul perda-perda yang mengundang pro dan kontra.
01.35-21.26	Himbauan larangan duduk mengangkang di atas sepeda motor bagi Perempuan di Lhokseumawe.	Mata Najwa menjadikan himbuan di Lhokseumawe sebagai aturan yang tidak mensejahterakan masyarakat.
22.31-30.46	Raperda pengaturan nama bayi dengan ciri khas kedaerahan di Surabaya.	Mata Najwa menjadikan raperda di Surabaya sebagai aturan yang tidak mensejahterakan masyarakat.
30.47-34.05	Inisiatif bupati membawa pejabat pemerintahan daerah ke penjara dan menginap di rumah warga miskin di Bualemo.	Mata Najwa menjadikan aturan di Bualemo sebagai contoh yang patut diteladani.
34.06-36.54	Aturan bupati untuk mewajibkan warga mengaji dan mematikan televisi saat magrib di Kampar.	Mata Najwa menjadikan aturan di Kampar sebagai contoh yang patut diteladani.
37.08-40.28	Komentar Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.	Mata Najwa menggunakan komentar Mendagri yang berfokus pada kritik terhadap perda-perda yang tidak penting.
40.29-41.18	Catatan Najwa	Mata Najwa menggunakan Catatan Najwa untuk me- <i>recall</i>

		bahwa saat ini banyak aturan pemda yang tidak penting dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
--	--	--

Sumber: olahan peneliti, 2013

Dari durasi waktu dalam kerangka skematik di atas terlihat bahwa Mata Najwa Balada Perda fokus pada perda yang tidak mensejahterakan masyarakat (sekitar 34 menit dari total siaran 41 menit).

Analisis dan Interpretasi

Temuan data menunjukkan bahwa secara tematik episode Balada Perda mengkritik keberadaan perda pasca otonomi daerah karena tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 136 ayat 2 menjelaskan perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam UU yang sama, pasal 20 ayat 1 c menyatakan penyelenggaraan daerah dilakukan berdasarkan asas kepentingan umum. Artinya, perda dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat secara umum. Kemudian, pasal 22 menjelaskan bahwa daerah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Ada tiga wacana yang dibangun dalam Mata Najwa Balada Perda:

1. Perda Melayani Kepentingan Pemerintah Daerah

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat 1c menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepentingan umum. Dengan demikian perda yang merupakan produk hukum (Paturusi, 2009, p. 105) pun harus melayani kepentingan umum.

Isu perda melayani kepentingan pemerintah telah dimunculkan sejak awal, melalui kata pembukaan Mata Najwa yang berbunyi:

¹“perda lokal berbagai rupa, menawarkan *jalan cepat* meraih ketaatan masyarakat.”

²“Ada perda hasil aspirasi publik, atau meladeni *kegenitan elit*.”

Najwa menggunakan kombinasi metafora “jalan cepat” dan “kegenitan elit” sehingga memberikan praanggapan perda menjadi produk hukum daerah untuk melanggengkan dan memenuhi kepentingan pemerintah daerah tanpa melihat konsekuensi pelaksanaan perda tersebut bagi masyarakat daerahnya ataupun pihak lain yang terkait.

Dalam praktik politik, Suaidi merupakan anggota Partai Aceh. Isu *bargaining* politik berarti Suaidi menjadikan larangan duduk mengangkang sebagai imbalan atau bayar jasa kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya memilih dia sebagai walikota.

Tindakan Suaidi yang dibentuk oleh Mata Najwa ini bertolak belakang dengan UU no.32 Tahun 2004 pasal 28a menegaskan bahwa kepala dan wakil kepala

daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri dan merugikan kepentingan umum. Sejak ditandatanganinya larangan duduk menganggang pada 1 Januari 2013, aturan tersebut tidak hanya mendapat sikap pro dari masyarakat, tetapi juga sikap kontra, baik dalam skala lokal maupun nasional.

2. Perda Mengintervensi Privasi Warga

Temuan data menunjukkan adanya sub episode perda mengintervensi privasi warga. Pada wawancara dengan Suaidi, Najwa membiarkan Suaidi memberikan detail mengenai hubungan tanggung jawab antara dirinya, Allah dan rakyat. Ia wajib menyampaikan kepada rakyat mengenai apa yang wajib dilakukan demi kebaikan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah. Namun keputusan untuk melaksanakan kebaikan itu merupakan urusan pribadi rakyat dengan Allah. Setelah Suaidi selesai, Najwa memulai pembentukan wacana perda mencampuri urusan privat seperti pada percakapan berikut:

¹NS: *Jadi memang sesungguhnya Anda melihat ini lebih ke urusan privat, urusan antara manusia dengan Tuhannya?*

²SY: *Iya..*

³NS: *Berarti kalau urusan privat tidak perlulah diatur dalam ranah publik Pak Walikota.*

⁴SY: *Aaa.. apa.. aaa. Aturan Allah disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Aceh, itu tetap mengikutinya.*

⁵NS: *Karena tadi Anda katakan itu urusan mereka dengan Tuhannya, berarti sesungguhnya ini memang sesuatu yang tidak perlu diatur (SY: urusan, urusan saya...) dalam masalah publik (SY: adalah..) karena ini urusan privat.*

Dalam kalimat 1 Najwa mengeluarkan pertanyaan yang sekaligus bersifat praanggapan bahwa menurut Suaidi urusan duduk menganggang adalah urusan privat, dengan keterangan/koherensi urusan manusia dengan Tuhan adalah urusan privat. Hal ini kemudian ditekankan dalam kalimat 3 dengan koherensi sebab akibat bahwa urusan duduk menganggang tidak perlu diatur dalam perda karena merupakan urusan privat. Suaidi kemudian memberkan penjelasan bahwa aturan Allah disesuaikan dengan budaya dan adat isitiadat Aceh. Namun pada kalimat 5 Najwa kembali menggunakan koherensi sebab akibat. Yang menjadi penyebab adalah urusan duduk menganggang merupakan urusan privat manusia dengan Tuhan, sehingga menimbulkan akibat duduk menganggang tidak perlu diatur dalam ranah publik. Dalam proposisi penyebab, Najwa menambahkan koherensi penjas “karna tadi Anda katakan” untuk menegaskan bahwa Suaidi sendiri mengakui bahwa urusan duduk menganggang adalah urusan privat.

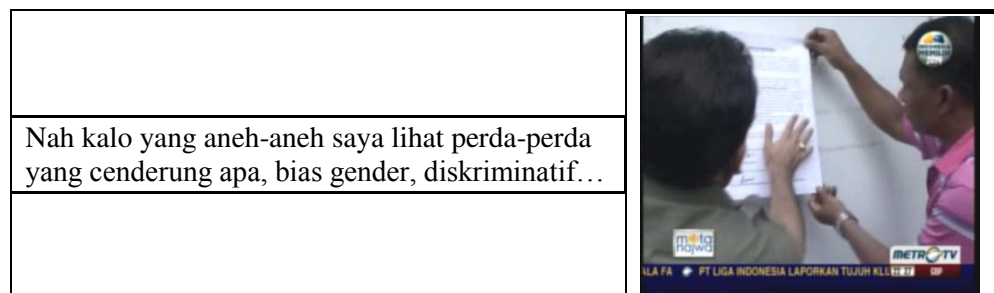
Fungsi perda untuk mengatur urusan publik sebenarnya telah terangkum dalam UU no.32 Tahun 2004 pasal 136 ayat 4 bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini berarti perda seharusnya mengurus kepentingan umum; kepentingan warga secara keseluruhan; urusan dalam ranah publik. Pada pasal 13 dan 14 mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah pun dijabarkan dengan jelas bahwa kewenangan pemerintah berada pada ranah

publik seperti pembangunan, tata ruang, sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, pengendalian lingkungan hidup, dan kependudukan.

3. Perda Mendiskriminasi Kelompok Tertentu

Pada menit 05.53-06.00 Najwa memunculkan wacana ini dengan mengumpukan Suaidi untuk memberikan detail dengan bertanya “*Kalau laki-laki yang duduk menganggang, menurut Anda itu budaya Aceh atau?*” Suaidi kemudian memberikan detail bahwa duduk menganggang merupakan kodrat laki-laki sebagai orang yang kasar. Temuan data menunjukkan dalam teks yang sama Suaidi memberikan koherensi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh duduk menganggang sedangkan perempuan harus bersikap sopan sehingga tidak boleh duduk menganggang.

Pembentukan wacana ini dilanjutkan dalam sub episode tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan menggunakan strategi grafis. Mata Najwa memunculkan kombinasi teks dan visual sebagai berikut:



Pada saat Gamawan mengucapkan kalimat tersebut, Mata Najwa memasukkan *insert* gambar Suaidi sedang menempel himbauan larangan menganggang. Mata Najwa secara tidak langsung mengungkapkan bahwa larangan menganggang adalah aturan yang bersifat diskriminatif.

UU no.32 tahun 2004 pasal 138 ayat 1 menyebutkan asas-asas yang harus ada dalam materi muatan perda, di antaranya bhineka tunggal ika dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada UU yang sama pasal 136 ayat 2 ditegaskan pula bahwa perda digunakan demi kepentingan umum. Artinya, muatan materi perda tidak boleh memberikan perlakuan yang spesial kepada kelompok tertentu dan membatasi kelompok lainnya.

Pembentukan wacana di atas sekaligus mendefinisikan dan memposisikan pihak-pihak atau individu ke dalam posisi tertentu. Althusser (dalam Eriyanto, 2012) menjelaskan Wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Berbicara mengenai wacana yang dibangun dalam pemberitaan mengenai peraturan daerah dalam Mata Najwa, ada empat pihak yang terlibat dalam produksi wacana yaitu masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri, dan Najwa Shihab sendiri.

Episode Balada Perda menunjukkan masyarakat sebagai korban, sebagai pihak yang dirugikan, sebagai pihak yang tidak menyetujui keberadaan perda-perda;

Pemerintah daerah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan perda untuk kepentingan pribadi; Mata Najwa memosisikan Mendagri sebagai pihak yang berkualitas dan berbobot untuk memberikan komentar terhadap situasi perda yang bermunculan pasca otonomi daerah; dan Mata Najwa mendefinisikan Najwa Shihab sebagai pihak otoritatif, kritis dan cerdas. Najwa Shihab menjadi pihak yang dominan dalam produksi wacana sehingga realitas yang disajikan oleh Najwa Shihab menjadi kebenaran yang lebih bisa diterima.

Mata Najwa melakukan praktik pengguliran wacana sesuai dengan konteks sosial saat itu untuk menjaga agar wacana tersebut tetap hidup dan hangat. Kesamaan pandangan wacana ini bisa jadi tidak sekedar untuk meneguhkan pandangan dominan, tetapi juga untuk menarik masyarakat agar menonton Mata Najwa, melihat fenomena tersebut sedang hangat pada saat penayangan edisi Balada Perda. Sudibyo (2006, p.5) menjelaskan bahwa pers telah memasuki era industri kapitalisme gobal, dan ada batasan-batasan struktural yang membuat tidak semua nilai-nilai ideal pers dapat diwujudkan. Ada sejumlah kompromi yang harus dilakukan dengan kaidah-kaidah pasar. Media tidak menjadi entitas otonom karena ada kekuatan-kekuatan ekonomi yang turut mempengaruhinya. Dengan demikian, Mata Najwa melakukan komodifikasi isi media untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas fenomena perda aneh dan mengundang pro kontra yang sedang hangat saat itu.

Simpulan

Peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis model Van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun tiga wacana yaitu perda melayani kepentingan pemerintah; perda mengintervensi privasi warga; dan perda mendiskriminasi kelompok tertentu.

Kekuatan Mata Najwa tidak hanya terbatas pada pembentukan wacana, namun juga sampai pada tahap pendefinisian dan penempatan posisi partisipan-partisipan produksi wacana. Melalui pembentuk wacana di atas, Mata Najwa memberikan definisi peran masyarakat, peran pemerintah daerah, peran menteri dalam negeri, dan peran Najwa Shihab sendiri.

Peneliti menemukan bahwa produksi *talk show* yang dilakukan Mata Najwa tidak hanya untuk menggulirkan wacana, tetapi sekaligus untuk menjawab kebutuhan pasar, sehingga berujung untuk memapankan kepentingan ekonomi Mata Najwa – Metro TV sendiri.

Ke depannya, para akademisi lain dapat melakukan penelitian analisis wacana kritis lainnya, sehingga dapat dikembangkan model analisis wacana kritis yang lebih efisien untuk teks berbasis audio visual. Penelitian berikutnya dapat melihat wacana kritis dari perspektif lainnya misalnya secara khusus melihat politik ekonomi Metro TV atau *eloquence*/kemampuan berbicara Najwa Shihab.

Para praktisi media harus kritis dalam produksi teks, melihat teks yang diproduksi mengandung wacana yang dapat mempengaruhi masyarakat. Produksi teks media harus dilakukan dengan jeli agar dapat menjadi sarana transformasi sosial untuk mendukung praktik demokrasi yang bersih dan jujur. Wacana yang dibentuk sebaiknya tidak hanya bersifat kritik, tetapi juga memberikan solusi agar media dapat menjadi agen penggerak dan perubahan ke arah yang positif.

Daftar Referensi

- Eriyanto.(2012). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Tolson, A. (2001). *Television talk shows: discourse, performance, spectacle*. London: Laurence Erlbaum Associates.
- Stokes, J. (2003). *How to do media & cultural studies*. London: Sage Publications Ltd.
- Silalahi, U. (2009). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Paturusi, I. A., dkk. (2009). *esensi dan urgenitas peraturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Author.
- Sudibyoy, A. (2006). *Politik media dan pertarungan wacana*. Yogyakarta: LKiS.